

**PERANAN PERS DI ERA OTONOMI DAERAH DALAM PEMBANGUNAN
KOTA PONTIANAK DI TINJAU DARI PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999**

**Oleh:
Ir. WERRY SYAHRIAL
A.2021131082**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Garuda Wiko, SH.,M.Si
Pembimbing II : Mawardi,SH.,M.Hum**

ABSTRACT

This thesis discusses the question of the role of the press in the era of regional autonomy in the construction of the city of Pontianak In Review from the Perspective of Law No. 40 of 1999. From the results of research using normative juridical legal research is concluded, that Law Number 40 Year 1999 regarding the Press has implications positively to the life of the press in support of the Development in the town of Pontianak, ie the growth and development of the life of the press that gives legal protection for members of the press, the public and the government. Some indication of the implications are reflected in terms of: Press can carry out the role, namely to uphold the basic values of democracy, rule of law, and human rights and to function well as a medium of information, education, entertainment, and social control as well as economic institutions; The press is not subject to censorship and the banning or prohibition of broadcasting, so it can provide information, objective and neutral; Implementation of the rights of the press just as the right to refuse, the right of reply, and the right of correction by Media Release; Society can participate in activities to develop freedom of the press through the press monitoring agency. Efforts were made Press / media related planning and budgeting process of local development, among others: Increase insight into society in a way to socialize vision and mission development at national, regional (provincial), and local (district / city), as well as various basic policies contained in regional planning documents, Increase public awareness of the meaning and responsibilities of regional development, so as to encourage their participation in the planning / implementation / oversight of the development and maintenance of development outcomes, improve openness and transparency by disseminating information to the public regarding and the regional agenda related to the development planning process, as well as product planning and budgeting of public concern, increase the participation and contribution of people's minds through aspiration nets (pooling opinion) community with regard to regional strategic issues, people's expectations, and substansi- the substance of the regional development plan, Improving accountability planning process by publicizing the implementation of planning processes and outcomes material formulation of plans and policies for the areas scrutinized and addressed other community, Boost democratization and commitment to the reduction of regional disparities through evaluation, criticism, and the safeguarding of the issue -isu development-related interests of marginalized people and problems of the development gap, improve the rule of law through the investigation, assessment, and advocacy for public policy formulation processes and budgeting and Improve the efficiency and effectiveness of local governments in development planning and budgeting through monitoring and supervision, assessment and criticism / feedback, socialization / dissemination of information throughout the process of development planning and budgeting as well as outcomes achieved.

Keywords: Role of the Press in the Era of Regional Autonomy In Pontianak City Development

ABSTRAK

Tesis ini membahas masalah peranan pers di era otonomi daerah dalam pembangunan Kota Pontianak Di Tinjau Dari Perspektif Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative diperoleh kesimpulan, bahwa Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mempunyai implikasi positif terhadap kehidupan pers dalam mendukung pembangunan di kota Pontianak, yaitu semakin tumbuh dan berkembangnya kehidupan pers yang memberikan perlindungan hukum bagi insan pers, masyarakat dan pemerintah. Beberapa indikasi implikasi tersebut tercermin dalam hal: Pers dapat melaksanakan peran, yaitu menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, supremasi hukum, dan hak azasi manusia dan menjalankan fungsinya secara baik sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial serta sebagai lembaga ekonomi; Pers tidak dikenakan penyensoran dan pembredelan atau pelarangan penyiaran, sehingga dapat menyajikan informasi secara, obyektif dan netral; Terlaksananya hak pers seperti hak tolak, hak jawab, dan hak koreksi oleh Media Pers; Masyarakat dapat melakukan peran serta dalam kegiatan mengembangkan kemerdekaan pers melalui lembaga pemantau pers. Upaya-upaya yang dilakukan Pers/media massa terkait proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, antara lain: Meningkatkan wawasan masyarakat dengan cara mensosialisasikan visi dan misi pembangunan baik di tingkat nasional, regional (provinsi), maupun lokal (kabupaten/kota), serta berbagai kebijakan pokok yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap makna dan tanggung jawab pembangunan di daerahnya, sehingga mendorong partisipasi mereka dalam proses perencanaan/pelaksanaan/pengawasan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan, Meningkatkan keterbukaan dan transparansi dengan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai informasi dan agenda daerah berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan, serta produk-produk perencanaan dan penganggaran yang menyangkut kepentingan publik, Meningkatkan partisipasi dan kontribusi pemikiran masyarakat melalui kegiatan jaring aspirasi (pooling pendapat) masyarakat berkaitan dengan isu-isu strategis daerah, harapan masyarakat, dan substansi-substansi rencana pembangunan daerah, Meningkatkan akuntabilitas proses perencanaan dengan mempublikasikan pelaksanaan proses-proses perencanaan serta hasil-hasil rumusan materi rencana dan kebijakan daerah untuk dikritisi dan ditanggapi masyarakat lainnya, Meningkatkan demokratisasi dan komitmen daerah terhadap pengurangan kesenjangan melalui evaluasi, kritik, dan pengawalan terhadap isu-isu pembangunan yang terkait kepentingan masyarakat marginal dan masalah kesenjangan pembangunan, Meningkatkan supremasi hukum melalui investigasi, pengkajian, dan advokasi terhadap proses perumusan kebijakan publik dan penganggaran daerah dan Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan melalui pemantauan dan pengawasan, kajian dan kritik/masukan, sosialisasi/penyebarluasan informasi seluruh proses perencanaan dan penganggaran pembangunan serta hasil-hasil yang dicapai.

Kata Kunci: Peranan Pers Di Era Otonomi Daerah Dalam Pembangunan Kota Pontianak

Latar Belakang

Berakhirnya era Orde Baru yang diktator tahun 1998, yang digantikan oleh era reformasi yang ditandai dengan demokrasi, membuat fenomena dari dunia pers di Negara Republik Indonesia bergeser dari yang sebelumnya terkekang kepada dunia pers yang bebas. Pergeseran perkembangan dunia pers ini ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, menggantikan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.

Seperti dijelaskan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Karangan Indrawan WS, Penerbit Lintas Media Jombang, diktator adalah berarti, “Kekuasaan yang tak terbatas”. Dengan ini, ada beberapa indikator yang dapat membuktikan bahwa Orde Baru adalah orde diktator, sebagai berikut : Pertama, penguasa bebas melakukan apa saja yang diinginkannya, tanpa perlu memperhatikan batasan-batasan kewenangannya. Kedua, penguasa bisa sewenang-wenang bertindak, tanpa mempedulikan aturan yang ada, apabila ada hal-hal yang menurutnya bisa mengganggu kelanggengan kekuasaannya. Ketiga, dengan dalih stabilitas keamanan, penguasa di era ini bisa mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) suatu media massa, apabila dia menilai akan pemberitaannya menjurus pada kritikan terhadap penguasa, dan beberapa hal lainnya. Banyak media yang mengalami pencabutan SIUPP di era ini. Antara lain Majalah Tempo, Tabloid Detik dan beberapa media lain.

Kalau diperbandingkan antara diktator dengan demokrasi, sungguh jelas sekali perbedaannya. Jika Indrawan WS dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yang diterbitkan Lintas Media Jombang memberikan pengertian dikator adalah kekuasaan yang tak terbatas, maka dalam kamus yang sama Indrawan

WS menjelaskan bahwa demokrasi adalah berarti,” Pemerintahan rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat”. Kalau pada era kekuasaan yang dikendalikan oleh pemerintahan yang dikator penguasa bisa berbuat bebas sesuai dengan keinginannya dan hanya berpegang pada prinsip bagaimana agar kekuasaan pemerintahannya selalu langgeng dan tetap bertahan, pada kekuasaan yang dikendalikan pemerintahan demokrasi, penguasa dalam menjalankan pemerintahan selalu berpegang teguh kepada prinsip untuk kepentingan rakyat dan tunduk serta patuh kepada ketentuan yang berpihak kepada rakyat.

Untuk lebih memperjelas tentang perbandingan antara demokrasi dan diktator di sini, dapat dikemukakan di sini pendapat Prof. DR. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U., dalam bukunya berjudul, ”Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan” yang diterbitkan penerbit Rineka Cipta pada halaman 19, yang menyatakan bahwa demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu, menurutnya hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Berpedoman kepada pendapat Prof. DR. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U. ini, maka dapat dikatakan bahwa otoriter adalah kebalikan dari demokrasi¹

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 telah membuat pers Indonesia berada pada tataran pers yang memiliki kemerdekaan sebagaimana yang telah diimpikan selama berpuluh-puluh tahun oleh rakyat Indonesia. Pers Indonesia yang selama berpuluh-puluh tahun terkekang, yang antara lain karena adanya

¹ Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H. S.U.. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan”, Rineka Cipta, 2001. hlm. 19

keharusan memiliki SIUPP, yang sewaktu-waktu bisa saja dicabut oleh penguasa apabila dinilai dapat mengganggu kelanggengan kekuasaannya, dengan dalih mengganggu ketertiban umum, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, SIUPP tidak berlaku lagi untuk penerbitan sebuah media massa.

Artinya, penguasa tidak lagi bisa membredel pers dengan dalih apapun juga. Pers sudah bisa menghirup udara kemerdekaan, sesuai dengan prinsip-prinsip kehadiran sebuah pers di Negara demokrasi. Di samping itu, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, wartawan telah bisa bebas memilih organisasi profesi pers, sehingga tidak lagi satu-satunya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) organisasi wartawan.

Apabila ditelusuri kembali ke belakang, kebebasan pers yang lahir melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 ini, adalah merupakan wujud nyata dari keinginan pasal 28, ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”.

Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28, telah dengan tegas menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan dan tulisan dijamin oleh Negara. Kalau masih ada kekangan dalam menyuarakan hati nurani rakyat melalui pers, berarti kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan tulisan berarti belum lagi dapat diwujudkan. Kalau belum dapat diwujudkan, berarti Bangsa Indonesia belum lagi memakai Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen, terutama dari sisi kemerdekaan menikmati kebebasan pers.

Kemerdekaan menikmati kebebasan pers ini sungguh sangat penting artinya dalam kawasan yang lebih luas daripada sekadar memenuhi keinginan

rakyat Indonesia semata, tetapi sekaligus juga telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dunia. Karena itu, kalau Negara Indonesia tidak memberikan kebebasan pers ini kepada rakyatnya, Indonesia akan tersisih dari pergaulan dunia. Karena itu, lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, sekaligus telah dapat menyahuti keinginan masyarakat dunia.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang antara lain menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi:” Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah”.

Dalam konteks ini, maka dapat dilihat bahwa kebebasan pers sungguh sangat penting artinya bagi seluruh warga masyarakat, tanpa ada kecualiannya, terutama dalam upaya meningkatkan pembangunan di segala bidang. Sebab, wujud dari pencapaian pembangunan dalam sebuah bangsa adalah pencerdasan bangsa itu sendiri. Sebuah bangsa akan bisa cerdas apabila rakyatnya memiliki ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan akan bisa diperoleh seluruh rakyat dalam sebuah bangsa apabila bangsa tersebut memberikan kebebasan kepada rakyatnya dalam memperoleh informasi. Karena informasi yang paling banyak itu bisa diperoleh melalui pers, dengan alasan pers memiliki profesi mencari,

mengumpulkan dan menyebarkan informasi, maka kebebasan pers dalam sebuah bangsa mutlak harus dapat diciptakan.

Bilamana dalam suatu bangsa atau dalam suatu kelompok masyarakat sekecil apapun masih ada keterkekangan informasi atau tidak tercipta kebebasan pers, akan sangat sulit mencapai target pembangunan dalam bangsa dan kelompok masyarakat tersebut. Lebih tragisnya lagi, kalau saja masih ada keterkekangan pers dalam suatu bangsa atau kelompok masyarakat sekecil apapun juga, berarti pada bangsa dan kelompok masyarakat tersebut telah terjadi penghilangan terhadap hak asasi manusia.

Selama kebebasan pers terbelenggu di Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik di era Orde Lama maupun di era Orde Baru, selama itu pulalah hak asasi manusia turut terbelenggu di negeri ini. Namun di sisi lain, tidak pula dapat ditutup mata, bahwa semenjak lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, kebebasan pers yang terkesan tidak lagi ada batasnya, telah membuat sebagian orang memanfaatkannya untuk hal-hal yang merugikan pihak lain.

Dengan kebebasan pers yang sama sekali tidak lagi ada aturan yang mengontrolnya, masyarakat menjadi resah karena pemberitaan pers. Ini disebabkan penerbitan pers dan perekrutan wartawan tak lagi ada seleksinya. Orang yang sama sekali tidak punya latar belakang pers, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 boleh mendirikan media. Orang yang sama sekali tidak memiliki latar belakang pers, tanpa ada aturan yang mengatur perekrutannya, dia boleh saja memiliki kartu pers. Dia boleh saja membanggakan diri bahwa dia adalah seorang wartawan. Fenomena ini membuat pemberitaan pers menjadi sangat sulit membedakan mana yang berita benar-benar objektif

dan mana pula yang berita hanya sekadar informasi sekadar untuk melepaskan sakit hati, atau hanya sekadar untuk menjelek-jelekkan orang lain.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 seakan-akan telah menjadi alat untuk memanfaatkan kesempatan menerbitkan pers dan menjadi wartawan bagi sebahagian orang, yang tanpa mempedulikan ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Misalnya, poin 4 Kode Etik Wartawan Indonesia mengatakan, "Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila."

Namun demikian, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, kebebasan pers telah dapat diwujudkan di Negara kesatuan Republik Indonesia secara menyeluruh, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai ke tingkat kelompok masyarakat paling kecil. Khusus di kabupaten/kota, sebagai daerah yang memiliki hak otonomi daerah, kebebasan pers yang ada saat ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya, terutama dalam mewujudkan pembangunan kabupaten/kota bersangkutan.

Lebih khusus lagi, untuk Kota Pontianak, kebebasan pers sungguh sangat terasa dampaknya bagi pembangunan di kota ini, terutama apabila dikaitkan dengan keberadaan kota ini sebagai kota pendidikan, di mana tingkat kecerdasan masyarakatnya sudah tergolong tinggi. Di samping itu, sekaligus sangat terasa pula dampaknya kelahiran Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 bagi Kota Pontianak,, apabila dikaitkan dengan keberadaan kota tersebut yang sangat egaliter karena kota ini terkenal sebagai Kota Khatulistiwa yang mana terdiri dari beragam Suku, Agama dan budaya yang berbeda. Dalam sebuah kota yang merupakan kota yang kaya akan keberagaman budaya, agama dan suku tentunya memiliki dampak yang sangat besar bagi kebebasan pers.

Bagi masyarakat Kota Pontianak, kebebasan mendapatkan informasi sama besar artinya dengan kebebasan berdemokrasi, karena sehari-hari masyarakatnya lebih banyak berkiprah sebagai ulama, pendidik, mahasiswa, mahasiswi, pelajar, politisi dan budayawan. Kritikan dan saran dari berbagai stakeholder untuk membangun daerah ini lah yang menjadi referensi jurnalis untuk memuat berita itu di media cetak atau media massa. Namun tidak jarang pemberitaan-pemberitaan yang secara tajam memberi kritikan kepada pemerintah daerah berujung pada aksi-aksi intimidasi terhadap para jurnalis yang bekerja di lapangan.

Masih ingat dipikiran kita pada kasus penembakan kaca gedung Graha Pena (kantor Rakyat Kalbar) 6 tahun yang silam, yang menurut penulis bahwa penembakan tersebut erat kaitannya dengan pemberitaan tentang kritikan pedas kepada kebijakan pemerintah daerah yang di nilai hanya berpihak pada golongan tertentu saja. Dan yang masih hangatnya kasus pencurian perangkat computer milik media cetak daerah Harian Berkas pada tanggal 29 Juli 2014, yang mana kasus pencurian tersebut menurut keterangan pihak kantor Harian Berkas sangat erat kaitannya dengan akan di terbitkannya berita tentang kritikan terhadap salah satu kepala daerah di Kalimantan Barat. Masih banyak lagi kasus-kasus kekerasan, intimidasi terhadap Pers yang nantinya akan penulis uraikan di Bab-bab selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka disusunlah proposal penelitian Tesis dengan judul, **"Peranan Pers Di Era Otonomi Daerah Dalam Pembangunan Kota Pontianak Di Tinjau Dari Perspektif Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999"**.

B. Permasalahan

1. Bagaimana pengaturan pers dalam menempatkan perannya terhadap pembangunan Kota Pontianak menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 ?
2. Apa hambatan dan kendala yang ditemui dan apa pula upaya yang ditempuh dalam mengatasi hal tersebut ?

C. Pengaturan Pers Dalam Menempatkan Perannya Terhadap Pembangunan Kota Pontianak Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

1. Konsekuensi Logis Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Kebebasan Pers.

Dengan memperhatikan substansi serta materi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, maka dapat diperoleh data dan fakta mengenai pengaturan dari undang-undang tersebut, yaitu: Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers telah mencerminkan perlunya kebebasan pers sebagaimana dimuat dalam diktum pertimbangan yang menyebutkan: Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis; Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak azasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, pembentuk opini harus dapat melaksanakan azas, fungsi, hak dan kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan

pers yang profesional, sehingga harus dapat menjamin dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.

Perumusan makna pers sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 1 mengandung makna yang lebih luas apabila dibandingkan dengan pengertian pers sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1984 maupun Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966. Ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tersebut menyatakan bahwa "Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kewajiban kegiatan jurnalistik meliputi; memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 lebih memberikan jaminan kemerdekaan pers sebagai hak azasi dari warga negara. Hal ini tercermin pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi "Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak azasi warga negara. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) ditegaskan bahwa "Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau larangan penyiaran", sedangkan ayat (3) menegaskan bahwa "untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi". Pengertian kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggungjawab profesi yang dijabarkan dalam kode etik jurnalistik, serta sesuai dengan isi hati nurani insan pers.

Pengaturan ketiga hak, yaitu hak tolak, hak koreksi dan hak jawab. Hak tolak yang dimiliki oleh wartawan untuk mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan. Di samping itu juga terdapatnya pengaturan hak koreksi yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan koreksi atau melakukan pembetulan kekeliruan informasi yang telah diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Kemudian pengaturan hak jawab, yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemetaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Wujud kegiatan peran serta masyarakat dalam mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak untuk memperoleh informasi tersebut berupa pantauan atau laporan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers, serta menyampaikan usulan dan saran kepada dewan pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

Keberadaan dan peran Dewan Pers. Dewan pers dibentuk secara independen untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers. Anggota dewan pers dipilih oleh organisasi wartawan, serta tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan di bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Wakil pemerintah yang dahulu berdasarkan Undang undang Nomor 21 Tahun 1984 merupakan salah satu anggota pers, berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tidak diberikan tempat lagi. Ketua Dewan Pers tidak lagi

dijabat oleh Menteri Penerangan (Komunikasi dan Informasi), akan tetapi saat ini dipilih dari dan oleh anggota. Setiap perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menyusun struktur dan sistem organisasinya sendiri. Dan yang lebih penting lagi, yaitu masalah pertanggungjawaban terhadap hukum, pengaturan semacam ini apabila terjadi kerugian akibat isi pemberitaan penerbitan yang dilakukan oleh perusahaan pers.

Kemudian dan hasil penjangkaran data yang diperoleh melalui *kuesioner (Daftar Pertanyaan)* yang diberikan kepada, dua harian perusahaan penerbitan pers, yaitu Pemimpin Redaktur Surat Kabar Harian Pontianak post, Rakyat Kalbar dan pemimpin Redaktur Koran Berkas yang terbit di Pontianak dapat diperoleh hasil sebagai berikut: Mengenai penilaian terhadap perubahan penerbitan pers setelah berlakunya Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, dinyatakan bahwa perubahan pemberitaan pers saat ini oleh perusahaan penerbitan pers ditanggapi secara positif. Perubahan pemberitaan pers, mengalami kemajuan yang cukup besar sebagai perwujudan proses, demokratisasi di negara Indonesia. Pers merupakan pilar keempat (*the fourth estate*) demokrasi setelah pilar-pilar legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemberitaan pers tidak dapat dikontrol oleh alat kekuasaan maupun para pemilik modal. Kebebasan pemberitaan media pers juga terjadi pada saat ini, lain halnya dengan situasi pada waktu sebelum keluarnya Undang undang Nomor 40 Tahun 1999, kondisi pers tidak bebas bergerak, tidak dapat melakukan kritik pada pemerintah yang berkuasa.

Terhadap keberpihakan pers adalah keberpihakan pers yang ideal. Responden memberikan jawaban, bahwa pers menghendaki keberpihakan kepada kebenaran. Pers dituntut untuk berpegangan atau berpedoman pada

norma-norma, nilai-nilai etik dan hukum dalam melihat kebenaran. Ide-ide kebenaran merupakan tempat untuk berpijak dalam menilai fakta. Sedangkan kenetralan menurut perusahaan penerbitan pers, Responden berpendapat bahwa hal tersebut lebih merupakan konteks teknis jurnalistik, dimana pers tidak memihak ketika menyampaikan berita kepada masyarakat. mengutamakan keseimbangan (*balance*) dan melakukan pengecekan pada sumber informasi secara akurat dan terpercaya. Terhadap masalah independensi Media Pers setelah berlakunya Undang undang Nomor 40 Tahun 1999, kedua responden memberikan jawaban bahwa pada intinya independensi pers sampai saat ini dan pada masa yang akan datang akan tetap selalu terus menjadi persoalan, karena pers bergerak secara dinamis dan dalam prakteknya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. Untuk itu perlu dilakukan pengkajian terhadap independensi pers dari intervensi negara, pemilik modal, maupun dari kelompok masyarakat yang memiliki peran ganda baik dari sebagai pelaku politik maupun ekonomi.

Hal yang menjadi jaminan terhadap kelanggengan dalam melaksanakan (mewujudkan) kebebasan pers, menurut jawaban responden adalah tidak cukup hanya jaminan dalam bentuk formal, yaitu Undang Undang Dasar 1945, jo. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, akan tetapi juga diperlukan keteguhan hati atau dedikasi yang tinggi dari para jurnalis yang setia pada profesinya. Apakah dalam pemberitaan oleh media massa pers yang berkaitan dengan agen sosialisasi konflik di dalam masyarakat masih dapat dikatakan dalam batas yang wajar, tidak melanggar peraturan yang berlaku. Responden menyatakan pemberitaan tentang sosialisasi konflik yang terjadi dalam masyarakat masih dalam status taraf yang wajar, dan tidak berlebihan.

Berdasarkan data yang telah disajikan di atas, dikaitkan dengan substansi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, maka dapat dilakukan analisis terhadap data tersebut untuk menjawab dua permasalahan sebagaimana tercantum dalam Rumusan Masalah pada Bab I. Bertitik tolak dari pandangan bahwa Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan salah satu perangkat aturan hukum yang mempunyai fungsi dalam usaha untuk mewujudkan suatu kehidupan bersama yang baik Fungsi hukum yang paling mendasar adalah mencegah bahwa konflik kepentingan itu dipecahkan dalam konflik terbuka, artinya semata-mata atas dasar kekuatan dan kelemahan pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu hukum (Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers) seharusnya mampu menjalankan fungsi tersebut dengan cara menyediakan suatu garis kebijaksanaan atau norma yang rasional dan berlaku umum. Keberadaan hukum mengarahkan pada penyelesaian konflik kepentingan tidak lagi dipecahkan menurut siapa yang paling kuat, melainkan berdasarkan aturan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai obyektif dengan tidak membedakan antara yang kuat dan yang lemah. Orientasi itu disebut keadilan. Dengan kata lain hukum berfungsi untuk memanusiakan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat. Adanya tatanan hukum akan menjamin bahwa orang atau golongan yang berkuasa tidak dapat bertindak sewenang-wenang.

Setelah yakin bahwa Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan perangkat hukum, selanjutnya perlu menguraikan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Dalam hal ini tentunya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tersebut mengandung nilai-nilai dasar yang berupa kesamaan, kebebasan dan solidaritas. Dari tiga nilai

dasar hukum tersebut dapat dirumuskan bahwa Negara wajib menjamin tatanan masyarakat yang sedemikian rupa hingga nilai-nilai dasar hukum tersebut dapat terlaksana secara optimal. Di sinilah letaknya untuk menganalisis apa implikasi berlakunya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap kehidupan pers nasional khususnya pada, Surat Kabar Harian Pontianak Post, Rakyat Kalbar dan Koran Harian Berkas.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara garis besar memuat, antara lain: Asas kemerdekaan pers, yaitu demokrasi, keadilan dan supremasi hukum; Fungsi Pers sebagai media informasi, pendidikan hiburan dan kontrol sosial dan lembaga ekonomi; Hak yang dimiliki oleh Pers Nasional, yaitu 1) kemerdekaan atau kebebasan pers yang dijamin sebagai hak asasi warga negara, 2) tidak dikenakan penyensoran, pemberadilatan atau pelarangan penyiaran, 3) hak untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, 4) wartawan memiliki hak tolak; Kewajiban Pers Nasional, yaitu 1) memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta azas praduga tidak bersalah, 2) melayani hak jawab, 3) melayani hak koreksi; Peran Pers Nasional, yaitu 1) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, 2) menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi. Mendorong terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan, 3) mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, dan 4) melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; serta 5) memperjuangkan keadilan dan kebenaran; Organisasi Wartawan; Pendirian Perusahaan Pers; Keberadaan Dewan Pers;

Peran serta masyarakat untuk mengembangkan kemerdekaan (kebebasan) pers.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari responden, yaitu Surat Kabar Harian Pontianak Post, Rakyat Kalbar dan Koran Harian Berkas yang kemudian dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 di atas, maka dapat dilakukan analisis sebagai berikut: Terhadap pelaksanaan ketiga asas, yaitu demokrasi, keadilan dan supremasi hukum ternyata Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 mempunyai implikasi positif bagi kehidupan pers. Hal ini didasarkan pada jawaban kedua responden yang menyatakan bahwa telah terjadi perubahan pemberitaan yang mengalami kemajuan cukup besar dalam proses demokratisasi. Dari sisi implikasi keadilan, responden menyatakan bahwa pers menghendaki keberpihakan pada kebenaran, berpegang pada norma-norma hukum, moral, pers yang tidak memihak ketika menuliskan fakta-fakta, mengusahakan keseimbangan (*balance*) dalam menyampaikan/ menyajikan berita, disamping itu juga melakukan *cross check* mengenai sumber berita secara akurat.

Terhadap implikasi fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial, serta lembaga ekonomi. Ternyata pers mempunyai implikasi yang positif, hal ini terbukti dengan fungsi pers itu sendiri yang memberikan informasi kepada para pembaca, tanpa ada rasa ketakutan, memberikan pendidikan kepada masyarakat sehingga sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, upaya memberikan kritik dan saran kepada Penguasa (pemerintah) dimana responden dapat melaksanakan hak tolak, hak jawab, dan hak koreksi dengan baik dan tanpa hambatan. Sedangkan implikasi fungsi pers sebagai lembaga ekonomi, nampak pada jawaban responden yang

menyatakan bahwa pers dapat meningkatkan kesejahteraan wartawan (insan pers) maupun karyawan yang bergerak di bidang Pers. Implikasi lain, yaitu bahwa Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 memberikan jaminan secara formal bagi kehidupan pers nasional untuk menyampaikan pemberitaan secara netral, obyektif.

Implikasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 terhadap pelaksanaan hak pers pasional, yaitu kemerdekaan (kebebasan) pers, penyensoran, dan pemberadilan atau larangan penyiaran serta mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi serta pelaksanaan hak tolak mempunyai implikasi positif. Hal ini terbukti dari jawaban responden yang menyatakan bahwa sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, media yang dipimpinnya belum pernah terkena penyensoran dan atau pembredelan. Hambatan pelaksanaan kebebasan pers yang dominan justru berasal dari faktor internal, yaitu masalah manajemen perusahaan pers, sedangkan faktor eksternal (kontrol pemerintah) hampir tidak pernah terjadi. Kontrol yang mempunyai kuantitas cukup besar berasal dari masyarakat, yaitu berupa kritik dan saran perbaikan.

Implikasi kewajiban Pers Nasional terhadap kehidupan pers nasional yaitu menumbuh kembangkan pemberitaan oleh pers nasional secara obyektif, berpihak pada kebenaran bukan kekuasaan, atau golongan kepentingan tertentu, menjaga keseimbangan pemberitaan melalui pelaksanaan hak jawab dan hak koreksi melalui media pers yang bersangkutan.

Implikasi peran Pers Nasional terhadap kehidupan pers; tercermin pada penyajian pemberitaan yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan peran Pers Nasional khususnya yang berkaitan

pemberitaan konflik politik, masih mengalami hambatan terutama yang menyangkut agenda kelompok primordial (suku, agama, ras). Peran Pers Nasional masih terhambat oleh belum tersosialisasikannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, khususnya para penegak hukum (Jaksa, Hakim, Polisi dan Pengacara/Advocat). Dengan demikian untuk penerapan hukum (*rechtstoepassing*) khususnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 ternyata unsur struktural (lembaga atau institusi) masih belum dapat memahami secara baik dan benar. Pemahaman yang keliru atau tidak utuh terhadap substansi suatu undang-undang yang akan diterapkan akan dapat menghasilkan sesuatu yang menyimpang dari apa yang dicita-cita oleh pembentuk undang-undang. Lebih dari itu akan berakibat pudarnya keadilan, sebagaimana hakekat atau tujuan akhir dari hukum atau undang-undang itu sendiri. Terhadap kondisi yang demikian perlu dilakukan sosialisasi (penyuluhan, penataran, kursus, dan penyegaran) melalui media elektronik maupun cetak. Implikasi Peran serta, masyarakat terhadap kehidupan pers nampak pada, kontrol sosial yang dilakukan melalui pembentukan lembaga pemantau pers (*Media Watch*) di beberapa Kota, termasuk di Pontianak.

Implikasi perusahaan penerbitan pers dan kebebasan untuk menentukan struktur organisasi pers, sangat positif. Data sekunder membuktikan bahwa struktur organisasi Perusahaan Penerbitan Pers Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat dan Koran Bernas mempunyai perbedaan, disesuaikan dengan kebutuhan /selera, organisasi.

2. Konsekuensi Logis Prinsip Pers yang Bebas dan Bertanggungjawab

Menurut responden, kriteria mengenai pers yang bebas adalah pers yang mampu membebaskan diri dari intervensi baik dari pemerintah yang berkuasa, pemilik modal maupun kelompok kepentingan. Sedangkan terhadap kriteria pers yang bertanggungjawab, responden memberikan jawaban bahwa pers yang bertanggungjawab adalah pers yang lebih dekat dengan Sistem *Pers Otoritarian* ketimbang Sistem *Pers Libertarian*. Karena di dalam Sistem *Pers Libertarian* kebebasan media/jurnalis dapat menjadi lembaga yang mengacaukan situasi sosial politik, dan akan melahirkan sosok wartawan yang tidak bertanggungjawab serta selalu curiga. Sistem, *Pers Libetarian* ini dapat terjebak menjadi agen utama perubahan sosial. Pers yang bertanggungjawab adalah pers yang mampu memberdayakan masyarakat. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 responden berpendapat mempunyai implikasi terhadap kebebasan pers khusus. Hal ini sangat tergantung pada bagaimana memberikan arti terhadap kebebasan pers tersebut. Kebebasan menurut responden lebih ditekankan pada kebebasan untuk memperoleh informasi. Namun demikian dalam memperoleh informasi tersebut, pers tetap harus berpegang pada prinsip tanggungjawab sosial sebagai bagian dari proses demokratisasi.

Terhadap tingkat kepuasan akan adanya kebebasan pers di Indonesia pasca dikeluarkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, responden memberikan jawaban cukup dan puas dengan adanya kebebasan pers yang diatur dalam UU ini. Namun demikian masih banyak aspek pers, yang harus dilakukan pembenahan, misalnya di kalangan wartawan yang berkaitan dengan profesionalismenya, Visi dari pemilik media yang hanya mengutamakan untuk meraih keuntungan yang bersifat finansil semata. Ada

pendapat yang menyatakan bahwa "Kebebasan Pers masih terhambat oleh faktor internal (dari manajemen Surat Kabar yang bersangkutan) dan eksternal (lembaga pemerintah yang berhak melakukan kontrol)", setujuah anda terhadap pendapat tersebut. Atas pertanyaan ini responden memberikan jawaban sangat setuju. Istilah lembaga kontrol kebebasan pers yang berasal dari pemerintah (bersifat eksternal) rasanya sudah tidak tepat, karena dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, pemerintah tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan penyensoran dan pembreidelan atau pelarangan penyiaran. Kontrol sosial saat ini bukan dari pemerintah, melainkan berasal dari masyarakat melalui lembaga pemantau media. Atas pertanyaan bagaimana kebebasan pers sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Responden memberikan jawaban bahwa kebebasan pers setelah dikeluarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terasa lebih baik dan membangun, karena tidak lagi dikenakan pembatalan SIUPP dan pembreidelannya. Hal itu dijamin dan mendapat pengaturan secara formal di dalam UU yang bersangkutan.

Peran serta dari masyarakat dan pemerintah yang bagaimana sebaiknya untuk mewujudkan kebebasan pers yang sebenarnya. Responden mcmb berikan jawaban, bahwa masyarakat pers harus meningkatkan standar profesionalisme dan standar etikanya. Pemerintah telah menyediakan aturan hukumnya (UU Nomor 40 Tahun 1999), namun demikian tidak cukup itu saja, masih diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermoral tinggi. Sedangkan masyarakat mengoptimalkan lembaga pemantau pers (*Media Wacth*) untuk melaksanakan kritik dan perbaikan bagi kebebasan pes yang ideal. Kendala dalam melaksanakan atau mewujudkan kebebasan pers, responden

memberikan jawaban, bahwa faktor kendala utama terletak pada belum tersosialisasikan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, baik dikalangan masyarakat maupun para penegak hukum (Jaksa, Hakim dan Polisi, serta Advokat/pengacara).

Terhadap struktur organisasi manajemen lembaga perusahaan, penerbitan pers setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 apakah ada ketentuan khusus. Responden memberikan jawaban tidak ada, bahkan perusahaan penerbitan pers mempunyai keleluasaan untuk memerlukan struktur organisasi, dan ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhan organisasi.

Prinsip-prinsip Pers bebas yang bertanggungjawab, yang tercermin dalam rumusan beberapa pasal dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 1 butir 8 tentang penyensoran, butir 9 tentang Pembreidelan atau pelarangan penyiaran, butir 10 tentang Hak Tolak, butir 11 tentang Hak Jawab, butir 12 tentang Hak Koreksi, butir 13 tentang Kewajiban Koreksi. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) bahwa pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembreidelan atau pelarangan penyiaran, ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak. Kemudian pada Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama, rasa kesusilaan masyarakat serta azas praduga tidak bersalah. Kemudian ketentuan Pasal 6 yang menyatakan bahwa pers nasional mengemban tugas untuk menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak azasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.

Berdasarkan hasil analisa data dari responden, secara tegas menyatakan bahwa sistem pers yang dianut atau diterapkan adalah sistem pers yang bebas dan bertanggungjawab. Bebas bukan berarti tanpa batas, dan Pers, Nasional bertanggungjawab terhadap masyarakat dan pemerintah menjunjung nilai-nilai dasar hukum, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Hasil jawaban kedua responden yang memberikan jawaban bahwa secara garis besar pemberitaan pers telah mencerminkan proses demokratisasi, pembentaaan pers tidak lagi dikontrol oleh pemerintah, keberpihakan pers didasarkan pada kebenaran dengan mendasarkan pada nilai-nilai moral dan etik serta hukum, pemberitaan diusahakan berimbang, terjadi pertumbuhan dan perkembangan kebebasan pers secara wajar. Disamping itu pemberitaan dilakukan dengan menekankan fakta yang sebenarnya (obyektif) tanpa ada pengaruh atau tekanan baik internal maupun eksternal. Masyarakat dapat memperoleh informasi secara benar, pemberitaan menciptakan rasa aman, sejahtera dan damai.

1. Peran Komunikasi dalam Pembangunan

Konsep komunikasi pembangunan dapat dilihat dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik) di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan; terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan.

Dalam arti sempit, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan, dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan agar

masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan.

Dalam karyanya, Schramm (1964) merumuskan tugas pokok komunikasi dalam suatu perubahan sosial dalam rangka pembangunan nasional, yaitu :

1. Menyampaikan kepada masyarakat, informasi tentang pembangunan nasional, agar mereka memusatkan perhatian pada kebutuhan akan perubahan, kesempatan dan cara mengadakan perubahan, sarana-sarana perubahan, dan membangkitkan aspirasi nasional.
2. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog agar melibatkan semua pihak yang membuat keputusan mengenai perubahan, member kesempatan kepada para pemimpin masyarakat untuk memimpin dan mendengarkan pendapat rakyat kecil, dan menciptakan arus informasi yang berjalan lancar dari bawah ke atas.
3. mendidik tenaga kerja yang diperlukan pembangunan, sejak orang dewasa, hingga anak-anak, sejak pelajaran baca tulis, hingga keterampilan teknis yang mengubah hidup masyarakat.

Media massa menurut Schramm secara sendirian atau bersama lembaga lain dapat melakukan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai pemberi informasi. Tanpa media massa sangatlah sulit untuk menyampaikan informasi secara cepat dan tepat waktu seperti yang diharapkan oleh suatu negara yang sedang membangun.
2. Pembuatan Keputusan. Dalam hal ini media massa berperan sebagai ipenunjang karena fungsi ini menuntut adanya kelompok-kelompok diskusi yang akan membuat keputusan, dan media massa menyampaikan

bahan untuk didiskusikan serta memperjelas masalah yang sedang diperbincangkan.

3. Sebagai Pendidik. Sebagian dapat dilaksanakan sendiri oleh media massa, sedangkan bagian yang lainnya dikombinasikan dengan komunikasi antar pribadi. Misalkan program-program pendidikan luar sekolah, atau siaran pendidikan.

Peran lain bagi media massa menurut Schramm, antara lain :

1. Meluaskan wawasan masyarakat
2. Memfokuskan perhatian masyarakat kepada pembangunan
3. Meningkatkan aspirasi
4. Membantu mengubah sikap dan praktek yang dianut
5. Memberi masukan untuk saluran komunikasi antar pribadi
6. Memberi status.
7. Memperlebar dialog kebijakan
8. Menegakkan norma-norma sosial
9. Membantu membentuk selera
10. Mempengaruhi nilai-nilai yang kurang teguh dianut dan menyalurkan sikap yang lebih kuat.

Gambaran pemikiran Schramm mengenai peranan komunikasi dalam pembangunan sebagai berikut :



Hedebro (1979) mendaftar 12 peran yang dapat dilakukan komunikasi dalam pembangunan, antara lain:

1. Komunikasi dapat menciptakan iklim bagi perubahan dengan membujuk nilai-nilai, sikap mental, dan bentuk perilaku yang menunjang modernisasi.
2. Komunikasi dapat mengajarkan keterampilan-keterampilan baru, mulai dari baca-tulis ke pertanian, hingga ke keberhasilan lingkungan, hingga reparasimobil.
3. Media massa dapat bertindak sebagai pengganda sumber-sumber daya pengetahuan.
4. Media massa dapat mengantarkan pengalaman-pengalaman yang seolah-olah dialami sendiri, sehingga mengurangi biaya psikis yang ekonomis untuk menciptakan kepribadian yang mobile.
5. Komunikasi dapat meningkatkan aspirasi yang merupakan perangsang untuk bertindak nyata.
6. Komunikasi dapat membantu masyarakat menemukan norma-norma baru dan keharmonisan dari masa transisi
7. Komunikasi dapat membuat orang lebih condong untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan di tengah kehidupan bermasyarakat.
8. Komunikasi dapat mengubah struktur kekuasaan pada masyarakat yang bercirikan tradisional, dengan membawakan pengetahuan kepada massa. Mereka yang beroleh informasi, akan menjadi orang yang berarti, dan para pemimpin tradisional akan tertantang oleh kenyataan bahwa ada orang-orang lain yang juga mempunyai kelebihan dalam hal memiliki informasi.
9. Komunikasi dapat menciptakan rasa kebangsaan sebagai sesuatu yang mengatasi kesetiaan-kesetiaan lokal.
10. Komunikasi dapat membantu mayoritas populasi menyadari pentingnya arti mereka sebagai warga negara, sehingga dapat membantu meningkatkan aktivitas politik.
11. Komunikasi memudahkan perencanaan dan implementasi program-program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan penduduk.
12. Komunikasi dapat membuat pembangunan ekonomi, sosial, dan politik menjadi suatu proses yang berlangsung sendiri (self-perpetuating).

2. Peran Media Massa dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Media merupakan unsur penting dan strategis dalam menentukan serta mendorong proses perubahan ke arah pengembangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Sasaran menuju pencapaian “good local governance” akan ditentukan juga oleh sejauhmana peran dan kontribusi media dalam proses-proses tersebut, termasuk juga pada tahapan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang meliputi aspek-aspek :

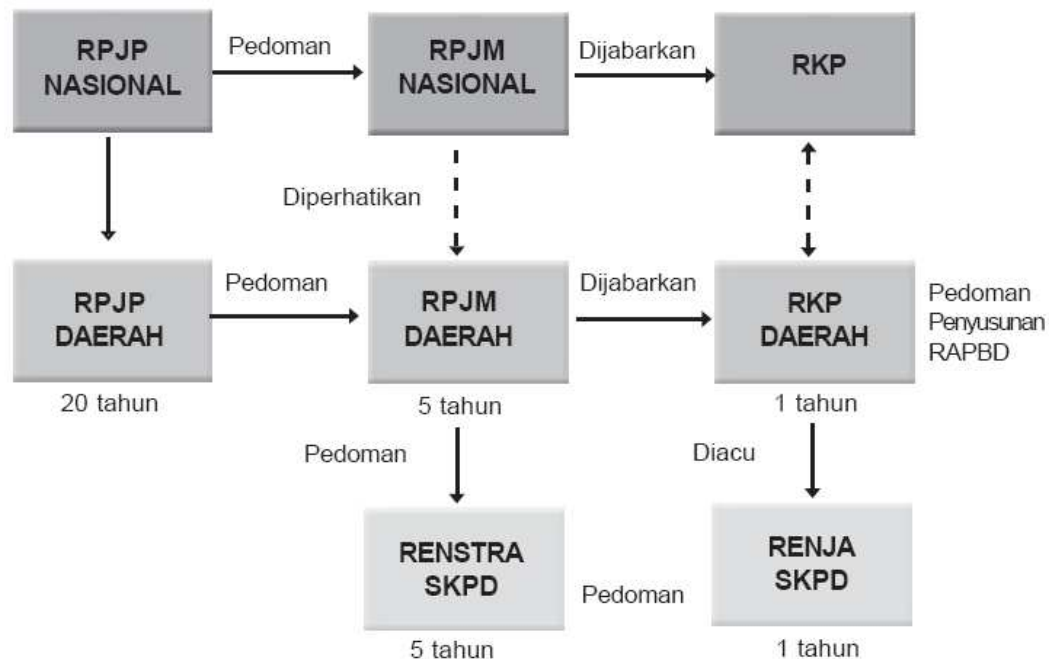
- Wawasan ke depan (*visionary*);
- Keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*);
- Partisipasi masyarakat (*participation*);
- Tanggung gugat (*accountability*);
- Supremasi hukum (*rule of law*);
- Demokrasi (*democracy*);
- Profesionalisme & kompetensi (*professionalism and competency*);
- Daya tanggap (*responsiveness*);
- Keefisienan dan keefektifan (*efficiency and effectiveness*);
- Desentralisasi (*decentralization*);
- Kemitraan dengan dunia usaha swasta & masyarakat (*private sector and civil society partnership*);
- Komitmen pada pengurangan kesenjangan (*commitment to reduce inequality*);
- Komitmen pada lingkungan hidup (*commitment to environmental protection*); dan
- Komitmen pada pasar yang fair (*commitment to fair market*).

Adapun jenis dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang wajib dimiliki oleh setiap daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan adalah:

- RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
- RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
- Renstra SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah)
- RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)
- Renja SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah)
- KUA (Kebijakan Umum APBD)
- PPAS (Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara)
- RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah)

- RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
- APBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
KUA, PPAS, RKA-SKPD, dan RAPBD merupakan kelengkapan dokumen yang harus disiapkan dalam rangka proses penyusunan APBD.

ALUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MENURUT UU 25/2004



Mengingat betapa pentingnya pemberian informasi pembangunan kepada masyarakat, berikut penulis kemukakan hasil wawancara dengan pihak Koran Pontianak post yang mengatakan:

1. Pontianak Post merupakan salah satu koran/surat kabar bagi masyarakat khususnya masyarakat Kalimantan Barat, yang terbit setiap hari dengan jumlah halaman sebanyak 28 halaman.
2. Sebagai salah satu koran yang utama dan terutama di Kalimantan Barat, Koran Pontianak Post juga berusaha menyajikan berita-berita hangat dan nyata dalam kehidupan masyarakat, termasuk masalah-masalah Pembangunan. Pontianak Post memang tidak menyiapkan kolom khusus mengenai Pembangunan di Kota Pontianak.

3. Berita-berita atau kolom yang terdapat pada Pontianak Post antara lain menyangkut ekonomi dan keuangan, ekonomi dan bisnis, internasional, nasional, aneka berita, berita daerah kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang terangkum dalam Metropolis, olah raga, mimbar pembaca, opini, dunia gemerlap, liputan khusus (seperti pemilu), dan lain sebagainya.
4. Walaupun tidak ada kolom khusus mengenai Pembangunan di Kota Pontianak di dalam kolom Pontianak Post, tetapi berita-berita mengenai Pembangunan yang hangat dan actual baik menyangkut masalah Pembangunan daerah maupun nasional dimuat dalam Pontianak Post, seperti masalah Infrastruktur jalan, pelabuhan, perdagangan, dan lain-lain serta dampak yang ditimbulkannya. bahkan dapat menjadi berita utama.

Apa yang dikemukakan oleh pihak Pontianak Post di atas, juga dipertegas dengan pendapat dari Walikota Pontianak yang mengatakan: Pontianak Post memang merupakan mitra pemerintah dalam mensosialisasikan atau menginformasikan berbagai hal tentang kondisi pembangunan di daerah, nasional, dan bahkan internasional.

1. Informasi yang telah disampaikan oleh Pontianak Post melalui beritanya sangat membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengetahui kondisi pembangunan terutama di Kota Pontianak.
2. Berkaitan dengan konsep pembangunan di Kota Pontianak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena banyak pelaksana pembangunan yang masih kuat berorientasi ekonomi dibandingkan dengan sisi ekologi dan sosial budaya.

Menurut A. Sonny Keraf (2001: 8-12) paling kurang ada tiga prinsip utama pembangunan berkelanjutan. Ketiga prinsip tersebut menjamin agar ketiga aspek

pembangunan di atas dipenuhi dan dalam arti itu ketiganya hanya mungkin dicapai kalau ketiga prinsip dasar ini dioperasikan sebagai sebuah politik pembangunan.

Prinsip pertama adalah *demokrasi*. Prinsip ini menjamin agar pembangunan dilaksanakan sebagai perwujudan kehendak bersama seluruh rakyat demi kepentingan bersama seluruh rakyat. Dengan kata lain, pembangunan bukan dilaksanakan berdasarkan kehendak pemerintah atau partai politik demi kepentingan rezim atau partai yang sedang berkuasa. Sebuah prinsip moral paling mendasar, khususnya untuk menjamin bahwa apa yang diidealkan sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan dapat mempunyai peluang untuk direalisasikan. Tanpa prinsip politik ini, sulit untuk berharap banyak bahwa pembangunan berkelanjutan dapat direalisasikan.

Kedua, Prinsip *Keadilan*. Prinsip ini pada dasarnya mau menjamin bahwa semua orang dan kelompok masyarakat memperoleh peluang yang sama untuk ikut dalam proses pembangunan dan kegiatan-kegiatan produktif serta ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.

Ketiga, prinsip *Keberlanjutan*. Prinsip ini mengharuskan bangsa Indonesia untuk merancang agenda pembangunan dalam dimensi visioner jangka panjang, untuk melihat dampak pembangunan baik positif maupun negatif dalam segala aspek yang berdimensi jangka panjang dan tidak hanya dalam dimensi jangka pendek. Prinsip ini sejalan dengan kenyataan bahwa sumber daya ekonomi terbatas, aspek sosial budaya dan lingkungan adalah aspek yang berdimensi jangka panjang, dan bahwa pembangunan berlangsung dalam ruang ekosistem yang mempunyai interaksi yang rumit.

Berkaitan dengan peran Pers/Media Massa dalam menginformasikan masalah Pembangunan di Kota Pontianak, Penulis mewawancarai salah satu pelanggan Media Cetak di kota Pontianak, Pelanggan tersebut mengatakan:

1. Peran yang diberikan oleh Media Cetak dalam menginformasikan masalah Pembangunan di Kota Pontianak, khususnya dan berita nasional dan internasional secara umum sudah sangat baik, karena berbagai berita mengenai Pembangunan : kemajuan *Infrastruktur*, Bisnis, dan lain-lain sebagainya telah diinformasikan oleh media ini.
2. Namun dalam beberapa hal mengenai penginformasian terhadap masalah Pembangunan Media Cetak ini kadang kala kurang diikuti dengan analisis hukumnya, sehingga yang terjadi hanya berita pemberitahuan saja, tanpa diikuti suatu analisis baik dari sisi hukum, dan lain sebagainya.
3. Media Cetak dalam menulis berita mengenai lingkungan hidup terkadang juga mendapat intervensi dari pihak lain, sehingga kadang-kadang tulisan yang disajikan terkesan banyak nuansa politis dibandingkan dengan kenyataan sesungguhnya.

D. Kesimpulan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mempunyai implikasi positif terhadap kehidupan pers dalam mendukung pembangunan di kota Pontianak, yaitu semakin tumbuh dan berkembangnya kehidupan pers yang memberikan perlindungan hukum bagi insan pers, masyarakat dan pemerintah. Beberapa indikasi implikasi tersebut tercermin dalam hal: Pers dapat melaksanakan peran, yaitu menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, supremasi hukum, dan hak azasi manusia dan menjalankan fungsinya secara baik sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial serta

sebagai lembaga ekonomi; Pers tidak dikenakan penyensoran dan pembreidelan atau pelarangan penyiaran, sehingga dapat menyajikan informasi secara, obyektif dan netral; Terlaksananya hak pers seperti hak tolak, hak jawab, dan hak koreksi oleh Media Pers; Masyarakat dapat melakukan peran serta dalam kegiatan mengembangkan kemerdekaan pers melalui lembaga pemantau pers.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gafur, *Hari-hari Terakhir Seorang Presiden*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000
- Abdul Rahman Wahid, *Melawan Melalui Lelucon*, Tempo, Jakarta, 2000
- Ahmad Watik Praktiknya dkk, *Pandangan dan Langkah Reformasi B.J. Habibie*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999
- Ashadi Siregar dkk, *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita Untuk Media Massa*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998
- Don Michael Flournoy(Ed.), *Analisa Isi Surat kabar-Surat kabar Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 1989
- Fachry Ali, Esai *Politik Tentang Habibie Iptek dan Transpormasi Kekuasaan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999
- F. Rachmadi, *Perbandingan Sistem Pers*, PT. Gramedia, Jakarta, 1990
- Hasan Shadily dkk, *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid 3, PT. Ikhtiar Baru-Van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects, Jakarta, 1989
- Hasan Shadily dkk, *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid 7, PT. Ikhtiar Baru-Van hoeve dan Elsevier Publishing Project, Jakarta, 1987
- Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Lintas Media, Jombang
- Ismail Suny, *Mencari Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif Suatu Penyelidikan Hukum Tata Negara*, Aksara Baru, Jakarta, 1986
- Larry King, *Seni Berbicara Kepada Siapa Saja, Kapan Saja, Di mana Saja*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006
- Legiman Misdiyono, *Misteri Operasi Intelijen*, Indomedia Publishing, Jakarta, 2007
- Manfred Oepen, *Media Rakyat Komunikasi Pengembangan Masyarakat*, P3M, Jakarta, 1988
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Mohammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, Tintamas, Jakarta, 1986
- Nurhuda Adinur dkk, *Perhumas Dalam Warna Menyusun Strategi, Membangun Korporasi & Menjaga Reputasi*, BPP perhumas Bidang Komunikasi, Jakarta, 2004
- Prasetyohadi, *Keadilan Dalam Masa Transisi, Komisi Nasional Hak Asasi*

- Manusia*, Jakarta, 2001
- S.L. Roy, *Diplomasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991 Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*, Pustaka irVan, Ciputat, 2006
- Wina Armada, S.A, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989
- Vera Jasini Putri, *Kamus Hukum Otonomi Daerah*, Friedrich-Naumann- Stiflung (FNSt), Jakarta, 2003
- Yurnaldi, *Menjadi Wartawan Hebat*, Citra Budaya Indonesia, Padang, 2004